

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK PELAKU TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN**

(Analisis Perbandingan antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh

**BADAR HUSAIN**  
**NIM: 10300110006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

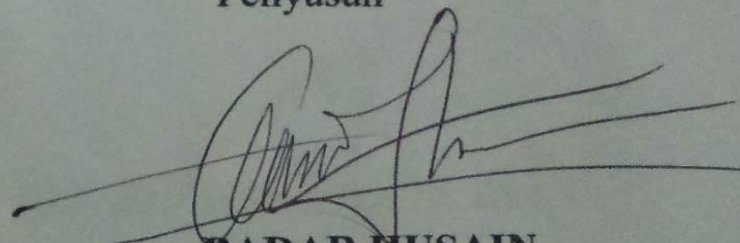
Nama : Badar Husain  
NIM : 10300110006  
Tempat/Tgl. Lahir : Palopo, 20 Januari 1991  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Jl. Mustafa Dg. Bunga  
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis Perbandingan antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)"

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Makassar, 19 November 2016

Penyusun



**BADAR HUSAIN**  
**NIM: 10300110006**



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peran Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan dalam Melindungi Hak Konstitusional Fakir Miskin Perspektif Hukum Islam", yang disusun oleh Sri Sutra Santi, NIM: 10300113150, mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 M, bertepatan dengan 8 Dzulqa'dah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).\*

Makassar, 6 Agustus 2017

14 Dzulqa'dah 1438 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum	(.....)
Munaqasah I	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	(.....)
Munaqasah II	: Dr. Hamzah Hasan, M.Hi	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Kurniati, M. Hi	(.....)
Pembimbing II	: Awalia Musgami, S.Ag, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP: 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis Perbandingan antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)” Untuk diajukan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan partisipasi baik dari pembimbing berupa bimbingan, motivasi, pikiran, tenaga, dan do’a dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan *support* sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua, Ayahanda H. Sarsali Nursin dan Ibunda Rusni, atas dukungan morilnya dan semuanya yang tidak terhingga (tidak ada do’a dan kasih sayangnya paling tulus dan besar selain do’a dan kasih sayang orang tua).
2. Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir, M.Si yang telah memberikan fasilitas penulis sehingga mampu menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Darussalam, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III atas segala fasilitas yang telah diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat kepada penulis.

4. Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si dan Dr. Kurniati, M.Ag selaku ketua dan sekretaris jurusan serta staff jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait dengan pengurusan akademik sehingga penyusun lancar dalam menyelesaikan semua mata kuliah dan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Kurniati, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Awalia Musgamy, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan kontribusi ilmu dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Saudara (i) dan sahabat-sahabat penulis jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta teman-teman seangkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kebersamaan kita semua selalu terpatri dalam lubuk hati yang paling dalam.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya melengkapi skripsi ini. Sebagai akhir, semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua.

Makassar, 03 Desember 2016

Penyusun

**Badar Husain**

**NIM. 10300110006**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-11</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>12-44</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian .....	12
1. Istilah Tindak Pidana .....	12
2. Tindak Pidana Perjudian .....	13
3. Jenis-Jenis Perjudian .....	15
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Berjudi .....	17
1. Faktor Sosial dan Ekonomi .....	17
2. Faktor Situasional .....	17
3. Faktor Belajar .....	18
4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan .....	18
5. Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan .....	19
C. Tipe-tipe Penjudi .....	19
1. Social Gambler .....	19
2. Problem Gambler .....	20
3. Pathologica Gambler .....	21



D. Upaya Penanggulangan Judi .....	22
E. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang .....	26
F. Faktor penyebab Anak Melakukan Kejahatan .....	29
G. Proses Pemidanaan Terhadap Anak .....	33
H. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam .....	36
I. Kerangka Konseptual .....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>45-47</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	46
E. Teknik Pengolaan dan Analisis Data .....	46
F. Pengujian Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48-68</b>
A. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian .....	48
B. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut <i>Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak</i> .....	56
C. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Islam .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69-70</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Implikasi Penelitian .....	70
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)



ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hau-la*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ...   أ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمُ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *aduwwun*

Jika huruf *ʿay* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf *alif* (ا) (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)



الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dirididahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū*

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat



## ABSTRAK

**Nama : Badar Husain**  
**NIM : 10300110006**  
**Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis Perbandingan antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam)**

---

Penelitian ini membahas tentang “Penetapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis Perbandingan antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam). Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak sehingga perlu untuk diketahui bagaimana penerapan sanksi pidana anak pelaku tindak pidana perjudian serta sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*) yang menekankan pada deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan. Adapun sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan. Pertama, bahwa penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak harus perlakukan khusus namun tetap diproses sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan proses hukumnya kepada tersangka anak harus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997. Konsep pemidanaan terhadap anak di bawah umur dikenal konsep *diversi* dan *restorative justice*. Proses *diversi* bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Sedangkan proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera, kedua bahwa penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian menurut hukum Islam. Kejahatan perjudian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa merupakan pelanggaran yang dimaafkan sehingga demikian apabila anak yang melakukan kejahatan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai suatu pembentukan karakter dan tidak dapat dihukum secara hukum Islam.

Untuk meminimalisir terhadap kejahatan perjudian yang dilakukan oleh anak serta perlu ditingkatkan bimbingan orang tua terhadap anaknya betapa bahayanya perjudian ditingkat anak-anak maupun orang dewasa serta mudhorat yang ditimbulkan dari permainan judi tersebut.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.<sup>1</sup>

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Disamping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.

---

<sup>1</sup>Santi Kusumaningrum, *Perkembangan Manusia* (Jakarta: Gramedia 2001), h. 77.

Penyimpangan tingkah laku atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,<sup>2</sup> kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang baik dan merugikan perkembangan dirinya.<sup>3</sup> Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Ilham Gunawan, *Tindakan Melanggar Hukum Yang dilakukan oleh Anak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 89.

<sup>3</sup>Harper Erica, *Anak dalam Pergaulan di Masyarakat dan Lingkungannya* (Surabaya: LP3I, 2007), h. 56.

<sup>4</sup>Achmad Amrullah, *Pembinaan, Pendidikan dan Pengembangan Perilaku Anak* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 71.

Hubungan antara orang tua dan anak merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan fisikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.<sup>5</sup>

Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interelasi antara manusia satu dengan manusia lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pergaulan hidup manusia pada hakekatnya setiap manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materil ataupun immaterial. Di mana dalam upaya mencapai hal tersebut, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya tidak sedikit yang saling bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan adanya suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan kemungkinan dapat menimbulkan tindakan anarkis, sedangkan kondisi yang sedemikian bukanlah merupakan hal yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, karena hal yang dicita-citakan oleh masyarakat

---

<sup>5</sup>Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana Anak* (Jakarta selatan: Gramedia, Raih Asa Sukses, 2010), h. 96.



dalam pergaulan hidupnya adalah terciptanya kehidupan yang tertib, damai dan tentram tersebut maka penguasa dalam hal ini negara telah menciptakan ketentuan-ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa penderitaan atau nestapa.

Norma-norma atau kaidah-kaidah dan hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan dinamakan norma sosial yang diantaranya norma hukum itu sendiri,<sup>6</sup> kaidah atau norma-norma hukum itu adalah peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya Undang-undang yang menjadi dasar hukum yang sesuai dengan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita. Dengan demikian diharapkan adanya kesatuan gerak, langkah dan

---

<sup>6</sup>Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 2012), h.122.

pandangan dalam rangka penegakan hukum sehingga tercapai sasaran semaksimal mungkin.<sup>7</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir disemua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini.

Adapun proses pembinaan anak dimulai dalam kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir batin. Persoalan kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di negara Indonesia masih banyak anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

---

<sup>7</sup>Abdullah Ghalib, *Undang-Undang yang Berdasarkan Hukum dan Pancasila* (Bandung: Nusa Media, 2013), h. 54.

Hal tersebut merupakan dasar yang melatar belakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan di sekitar dapat mempengaruhi perilakunya.<sup>8</sup>

Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku tersebut.<sup>9</sup> Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat Nasional bagi generasi muda melalui tatanan peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum. Yang dimaksud untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena di lain pihak mereka merupakan tunas-tunas bangsa yang diharapkan berperilaku baik dan bertanggungjawab.

Pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses yang berterusan, berkembang, dan serentak dengan perkembangan individu seorang anak yang mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dengan kemahiran yang diperolehnya anak akan mengaplikasikannya dalam konteks yang bermacam-macam dalam hidup

---

<sup>8</sup>M. Sofyan Lubis, *Menghadapi Perbuatan dan Tingkah Laku Anak Nakal* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2003), h. 112.

<sup>9</sup>Winata Hadi, *Pengembangan dan Pendidikan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 23.

kesehariannya di saat itu ataupun sebagai persiapan untuk kehidupannya dimasa yang akan datang.

Menurut perspektif Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggungjawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak.

Oleh karena itu, orang tua bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah SWT. Fitrah ini merupakan kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia. Di dalamnya terkandung kekuatan potensial untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dan mengarahkannya untuk mencapai tujuan penciptaannya.

Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada setiap orang tua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Anfal/9:28. Allah SWT berfirman:



وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar”.<sup>10</sup>

Ayat tersebut diatas, menjelaskan salah satu ujian yang diberikan Allah SWT kepada orang tua adalah anak-anak mereka. sehingga orang tua berkewajiban terhadap anaknya untuk mendidiknya dan menjaga agar tidak terjerumus ke perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Termasuk menjaga anak agar tidak melakukan tindak pidana seperti perjudian dan tindak pidana lainnya. Itulah sebabnya setiap orang tua hendaklah benar-benar bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan Allah SWT sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang dididik mengikuti ajaran Islam maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka.

Namun, fenomena yang ada menunjukkan masih banyak orang tua yang tidak bertanggungjawab terhadap anak-anaknya. Masih banyak anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orang tua mereka seperti: hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang halal dan baik, dan sebagainya sehingga anak tersebut terjerumus untuk melakukan perbuatan salah seperti perjudian dan perbuatan pidana lainnya yang jelas didalam ajaran agama Islam sangat dilarang atau diharamkan

---

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta media, 2005), h. 142.

begitupun dalam aturan perundang-undangan hal tersebut sangat dilarang, dan bagi anak yang melanggarnya maka dapat dihukum, akan tetapi anak bukan hanya sekedar tanggungjawab orangtua akan tetapi merupakan juga tanggungjawab pemerintah, karena mereka adalah masa depan bangsa.

Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. maka penulis mengangkat judul skripsi **“Penerapan Sanksi Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Analisis Perbandingan Antara Hukum Nasional dengan Hukum Islam)”**.

#### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Dalam penelitian ini, fokus penelitian mengenai penerapan sanksi pidana anak pelaku tindak pidana perjudian dan penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum Islam dengan membandingkan penerapan sanksi antara hukum Nasional dengan hukum Islam.

#### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perbandingan antara hukum Nasional dan hukum Islam tentang penerapan sanksi pidana anak pelaku tindak pidana perjudian?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum Islam?

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literature yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut:

Ilham Gunawan dalam bukunya, *“Tindakan Melanggar Hukum yang Dilakukan oleh Anak*. Yang menyatakan bahwa penyimpangan tingkah laku atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, namun pada dasarnya faktor lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak.<sup>11</sup>

M. Sofyan Lubis dalam bukunya, *“Menghadapi Perbuatan dan Tingkah Laku Anak Nakal”*. Yang menyatakan bahwa tindakan anarkisme dari kalangan ormas keagamaan terhadap maraknya praktik perjudian yang ada, maka sudah seharusnya pemerintah bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tanggap dan segera membuat perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” yang lebih tegas, khususnya larangan pemberian izin judi di tempat umum

---

<sup>11</sup>Ilham Gunawan, *Tindakan Melanggar Hukum yang Dilakukan oleh Anak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 126.

atau di kota-kota dan di tempat-tempat pemukiman penduduk, agar negara kita yang berdasarkan Pancasila dengan masyarakatnya yang religius tetap terjaga *imagenya*.<sup>12</sup>

## **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan antara hukum Nasional dan hukum Islam tentang penerapan sanksi pidana anak pelaku tindak pidana perjudian
- b. Untuk mengetahui dampak penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dalam perspektif hukum Islam

### **2. Kegunaan**

- a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana terutama pembaharuan hukum dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap anak.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta dalam berpartisipasi dalam pembinaan hukum Nasional.

---

<sup>12</sup>M. Sofyan Lubis, *Menghadapi Perbuatan dan Tingkah Laku Anak Nakal* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), h. 78.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian

##### 1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>1</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keragaman pendapat di antara para serjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

##### 1) Perbuatan Pidana

Mulyanto, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan Pidana, Menurut pendapat beliau istilah “Perbuatan Pidana” menunjuk kepada makna adanya

---

<sup>1</sup>Emilia Setyoning, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2010), h. 46.

suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>2</sup>

## 2) Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa Pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari peristiwa Pidana lebih menuju kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>3</sup>

## 3) Tindak Pidana

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap pada pemakaian istilah tindak Pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Jadi Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman Pidana.<sup>4</sup>

## 2. Tindak Pidana Perjudian

Pada dasarnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

---

<sup>2</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 46.

<sup>3</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 47.

<sup>4</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 48.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Perjudialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.”<sup>5</sup> Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur:

- a. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

---

<sup>5</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ke II; Jakarta: Balai Pustaka 1995), h. 419.

<sup>6</sup>Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962), h. 220.



- b. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepak bola, bulu tangkis, volly dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur diatas.

### 3. Jenis-jenis Perjudian

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

Pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari *Roulette*, *Blackjack*, *Baccarat*, *Creps*, *Keno*, *Tombola*, *Super Ping-pong*, *Lotto Fair*, *Satan*, *Paykyu*, *Slot Machine (Jackpot)*, *Ji Si Kie*, *Big Six Wheel*, *Chuc a Luck*, *Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran)*. *Pachinko*, *Poker*, *Twenty One*, *Hwa Hwe* serta *Kiu-Kiu*.

---

<sup>7</sup>Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 276.

Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar pasir atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong atau macak dan erek-erek.

Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing.<sup>8</sup>

Jika kita perhatikan perjudian yang berkembang dimasyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarannya. Yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan berbagai jenis permainan olah raga.

Selain yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut, masih banyak perjudian yang berkembang di masyarakat. Semisal “*adu doro*”, yaitu judi dengan mengadu burung merpati. Dimana pemenangnya ditentukan oleh peserta yang merpatinya atau merpati yang dijagokannya mencapai finish paling awal. Yang paling marak biasanya saat piala dunia. Baik di kampung, kantor dan cafe, baik tua maupun muda, sibuk bertaruh dengan menjagokan tim favoritnya masing-masing. Bahkan bermain catur pun kadang dijadikan judi.<sup>9</sup>

Pada umumnya masyarakat Indonesia berjudi dengan menggunakan kartu remi, domino, rolet dan dadu. Namun yang paling marak adalah judi togel (toto gelap). Yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka si pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Judi ini mirip dengan judi buntut yang

---

<sup>8</sup>Sofyan Lubis, *Tinjauan Hukum tentang Judi* (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 230.

<sup>9</sup>Hengki Kurniawan, <http://agnesekar.wordpress.com/penanggulangan-masalah-narkobamiras-dan-judi/>. (Diakses pada Jum'at 11 November 2016)

berkembang pesat pada tahun delapan puluhan sebagai eksekusi dari SDSB atau Porkas.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Berjudi**

Bahwa perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh 5 (lima) faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Kelima faktor tersebut adalah:<sup>10</sup>

### **1. Faktor Sosial & Ekonomi**

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas

---

<sup>10</sup>Haryanto, *Indonesia Negeri Judi* (Jakarta: Yayasan Khasanah Ihsan Mandiri, 2003), h. 136.

## 2. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja, padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil. Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

## 3. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

#### 4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

#### 5. Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, h. 139.

### C. Tipe-tipe Penjudi

Ada tiga tingkatan atau tipe penjudi, yaitu:<sup>12</sup>

#### 1. *Social Gambler*

Penjudi tingkat pertama adalah para penjudi yang masuk dalam kategori "normal" atau seringkali disebut *social gambler*, yaitu penjudi yang sekali-sekali pernah ikut membeli lottery (kupon undian), bertaruh dalam pacuan kuda, bertaruh dalam pertandingan bola, permainan kartu atau yang lainnya. Penjudi tipe ini pada umumnya tidak memiliki efek yang negatif terhadap diri maupun komunitasnya, karena mereka pada umumnya masih dapat mengontrol dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Perjudian bagi mereka dianggap sebagai pengisi waktu atau hiburan semata dan tidak mempertaruhkan sebagian besar pendapatan mereka ke dalam perjudian. Keterlibatan mereka dalam perjudian pun seringkali karena ingin bersosialisasi dengan teman atau keluarga. Di negara-negara dimana praktek perjudian tidak dilarang dan masyarakat terbuka terhadap suatu penelitian seperti di USA, jumlah populasi penjudi tingkat pertama ini diperkirakan mencapai lebih dari 90% dari orang dewasa.

#### 2. *Problem Gambler*

Penjudi tingkat kedua disebut sebagai penjudi "bermasalah" atau *problem gambler*, yaitu perilaku berjudi yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan pribadi, keluarga maupun karir, meskipun belum ada indikasi bahwa mereka mengalami suatu gangguan kejiwaan (*National Council on Problem Gambling USA, 1997*). Para penjudi jenis ini seringkali melakukan

---

<sup>12</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), h. 204.

perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari berbagai masalah kehidupan. Penjudi bermasalah ini sebenarnya sangat berpotensi untuk masuk ke dalam tingkatan penjudi yang paling tinggi yang disebut penjudi patologis jika tidak segera disadari dan diambil tindakan terhadap masalah-masalah yang sebenarnya sedang dihadapi. Menurut penelitian Shaffer, Hall, dan Vanderbilt (1999) yang dimuat dalam *American Journal of Public Health*, No. 89, ada 3,9% orang dewasa di Amerika Bagian Utara yang termasuk dalam kategori penjudi tingkat kedua ini dan 5% dari jumlah tersebut akhirnya menjadi penjudi patologis.

### 3. *Pathological Gambler*

Penjudi tingkat ketiga disebut sebagai penjudi "patologis" atau *pathological gambler* atau *compulsive gambler*. Ciri-ciri penjudi tipe ini adalah ketidakmampuannya melepaskan diri dari dorongan-dorongan untuk berjudi. Mereka sangat terobsesi untuk berjudi dan secara terus-menerus terjadi peningkatan frekuensi berjudi dan jumlah taruhan tanpa dapat mempertimbangkan akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, karir, hubungan sosial atau lingkungan disekitarnya. *American Psychiatric Association* atau APA mendefinisikan ciri-ciri *pathological gambling* sebagai berikut: "*The essential features of pathological gambling are a continuous or periodic loss of control over gambling; a progression, in gambling frequency and amounts wagered, in the preoccupation with gambling and in obtaining monies with which to gamble; and a continuation of gambling involvement despite adverse consequences*".



Diakui atau pun tidak, praktek perjudian di Indonesia tetap saja tumbuh dan berkembang di seluruh penjuru negeri ini, apalagi dengan tidak kunjung adanya supremasi hukum seperti yang dicita-citakan oleh para kaum reformis selama ini. Dengan semakin banyaknya tempat-tempat perjudian dan tersedianya sarana yang memungkinkan para penjudi untuk berpartisipasi tanpa harus hadir langsung secara fisik di tempat perjudian tersebut (cth. lewat internet atau telepon), maka dapat dipastikan bahwa para penjudi patologis akan terus bertambah dari hari ke hari. Kenyataan ini tentu saja harus menjadi perhatian serius para professional seperti psikolog, psikiater, konselor atau terapist dalam membimbing para penjudi tersebut supaya dapat kembali ke kehidupan normal. Tugas ini tentu bukan hal yang mudah mengingat di Indonesia belum banyak diperoleh hasil penelitian ataupun referensi tentang sisi-sisi psikologis seorang penjudi karena *sample* yang mau diteliti tentu amat langka sebagai akibat dari dilarangnya perjudian secara hukum. Namun satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana mencegah supaya diri kita tidak terlibat ke dalam perjudian. Ibarat kata pepatah "adalah lebih baik mencegah daripada mengobati".<sup>13</sup>

#### **D. Upaya Penanggulangan Judi**

Judi sudah berurat akar dimana-mana. Sekalipun jenis dan wujudnya berbeda tapi esensinya sama yaitu judi. Pokoknya kegiatan yang mengandung unsur harapan untuk menang, untuk kompetensi, adu nasib, untung-untungan, di dalamnya ada unsur judi. Tapi jangan lupa bahwa judi juga mengandung unsur

---

<sup>13</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, h. 206.

seni yang tinggi. Kadang orang tidak mempermasalahkan kalah atau menang, tapi akan bangga apabila hasil perkiraan/analisisnya secara matematis tepat. Judi selalu memberikan harapan kepada setiap orang, sekalipun harapan tersebut sulit untuk diwujudkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Marcello Truzzi ( 1974 ) yang berpendapat bahwa judi adalah bentuk dari penyimpangan atau penyelewengan budaya yang berhubungan dengan empat hal mengapa orang berjudi:

1. Judi adalah bentuk hiburan, oleh karenanya judi adalah bentuk pelarian dari kegiatan rutinitas dan kebosanan dan kesibukkan sehari-hari.
2. Judi adalah safety valve-katup penyelamat, yaitu alat untuk memenuhi aspirasi, para pecandu judi akan melampiaskan kemarahan, frustrasi dan kekecewaan mereka.
3. Judi membuat orang selalu berpengharapan karena judi menjanjikan suatu kemenangan atau perbaikan kehidupan social para pecandunya, dan
4. Disamping berpikir irasional, lebih sering para penjudi berpikir secara rasional, akhirnya tindakan tersebut dapat mengatur dan melatih untuk berpikir rasional dan logis dan hidup disiplin.

Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi judi ini:

- a. Dibasmi sampai keakar-akarnya. Namun cara ini dipandang tidak efektif karena kemungkinan akan timbul judi dengan jenis lainnya.
- b. Dilegalkan dan dilokalisir. Dari sisi budaya dan hukum Nasional masih dapat diterima, namun bertentangan dengan nilai-nilai agama, apabila dapat dilegalkan dan dilokalisir judi kupu harus didukung oleh perangkat peraturan

hukum yang tegas yang ,mengatur siapa yang diizinkan dan batas umur bagi pengunjung yang boleh masuk arena perjudian. Kemudian jenis judi lainnya dalam hubungannya dengan ritual kematian seperti dadu dan selikur, agar pelaksanaannya diatur dengan tegas dengan peraturan daerah agar tidak mencemari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ritual kematian dikalangan masyarakat Dayak yang masih kaharingan.

c. Pengganti alternatif

*Pertama*, misalnya judi kupu ini dilegalkan dengan cara lain yaitu dengan menggunakan system kupon berhadiah seperti SDSB ( Sumbangan Dana Sosial Berhadiah ) dengan hadiah pertama satu miliar rupiah. Namun harus ada larangan tegas masyarakat tidak boleh bermain kupu dengan mempertaruhkan ekor, puluhan, ratusan, dan ribuan. SDSB ini diputar sekali seminggu.

*Kedua*, menghapus kupu dan mengalihkannya pada undian bulanan melalui bank (BRI,BNI,Bank Danamon,BPD dan lain-lain ). Caranya, setiap kelipatan seratus ribu rupiah, penabung memperoleh satu kupon undian yang akan di undi setiap bulan dengan berbagai hadiah menarik, baik berupa uang maupun berupa barang. Namun cara alternatif demikian diperkirakan kurang diminati karena didalamnya tidak ada unsure bertanding, unsure strategi dan seni.

d. Dengan menindak pegawai negeri yang ketahuan bermain judi kupu tidak akan efektif. ibarat memangkas pohon, kalau yang dipangkas adalah rantingnya, maka pohon itu akan semakin subur dan rindang. Maka bila ingin membasminya, pohon tersebut harus dicabut hingga ke akarakarnya.

- e. Menegakkan Peraturan Hukum yang sudah ada. Misalnya pasal 303 ayat 1,2,3 dan pasal 303 ayat 1 dan 2 KUHP sudah mengatur tentang judi, demikian pula definisi tentang judi. Namun yang dipertanyakan karena judi kupu termasuk baru, apakah judi kupu dapat dikategorikan sebagai judi. Bila dilihat dari definisi diatas, maka kupu dapat disebut sebagai judi karena ia memiliki aspek harapan untuk menang, aspek untung-untungan dan kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Sebenarnya pasal 303 ayat 1 sudah jelas maknanya dan pelaku judi dapat ditindak bila:

- 1) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam main judi.
- 2) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.
- 3) Turut main judi sebagai pencaharian. Ayat 2 kalau tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu. Kemudian pasal 303 ayat 2 barang siapa turut main judi di jalan umum atau dekat jalan umum atau ditempat yang dapat di kunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi itu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Haryanto, *Indonesia Negeri Judi* (Jakarta: Yayasan Khasanah Ihsan Mandiri, 2003), h. 365.

### **E. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang**

Berdasarkan pengetahuan umum yang dimaksud dengan anak seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenile* adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan.

Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang sebagai berikut:

#### **1. Anak menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).**

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanya definisi tentang “belum cukup umur” (*Minderjarig*), serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi:

“Dalam menuntut orang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut”.<sup>15</sup>

Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

---

<sup>15</sup>R. Sunarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 34.

2. Anak menurut Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child*.

Dalam pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.<sup>16</sup>

3. Anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam pasal 1 angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>17</sup>

4. Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Peradilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 tahun membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori:

Dalam pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum” yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12

---

<sup>16</sup>Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

<sup>17</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

(dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

5. Anak menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Dalam pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama samapi usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>19</sup>

6. Anak menurut pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa:

“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.<sup>20</sup>

Dari Pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan anak adalah laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun.

Menurut Konvensi Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1999, menerangkan bahwa yang dimaksud anak adalah Setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai batasan umur anak menurut berbagai peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatankan bahwa dalam

---

<sup>18</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Peradilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

<sup>19</sup>Panjaitan dan Simorangkir, *Lembaga Perasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 129.

<sup>20</sup>Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

<sup>21</sup>Menurut Konvensi Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1999.



sistem berlaku saat ini tidak ada keseragaman didalam menentukan batas usia.

#### ***F. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan***

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini telah melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku masyarakat baik orang dewasa maupun anak. Bahwa melalui media massa baik cetak maupun elektronik ditayangkan informasi mengenai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenai status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindak pidana atau berperilaku yang merugikan diri sendiri dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Sehingga muncul istilah anak, yakni anak yang melakukan tindak pidana.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam, pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan

“mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya”.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, di antaranya adalah

1. Pendidikan keluarga yang kurang baik
2. Pengaruh informasi melalui media yang kurang mendidik
3. Gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang terlalu memanjakan anaknya.<sup>22</sup>

Faktor-faktor penyebab tersebut dapat direduksi menjadi dua faktor utama penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana, yakni faktor intern dari lingkungan keluarga dan faktor ekstern dari lingkungan masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak adalah keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Keluarga dengan ayah bunda yang tidak bisa berfungsi sebagai pendidik, Sehingga anak tidak bisa menjadi dewasa secara psikis dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya.
- b. Tidak berfungsinya keluarga sebagai lembaga psiko-sosial. Orang tua tidak bisa mengintegrasikan anaknya dalam keutuhan keluarga.<sup>23</sup>

Dengan demikian ketidakharmonisan hubungan orang tua dengan anak dalam keluarga akan sangat mempengaruhi jiwa anak sehingga anak akan cenderung menjadi nakal. Hal ini akan dialami juga anak di bawah umur. Kondisi

---

<sup>22</sup>Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana Anak* (Jakarta selatan: Gramedia, Raih Asa Sukses, 2010), h. 125.

<sup>23</sup>Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana Anak*, h. 126.

keluarga yang kurang harmonis justru akan merusak jiwa anak yang ditandai dengan munculnya sikap-sikap permusuhan dan agresivitas yang destruktif (merusak dan membahayakan).

Kebiasaan dalam lingkungan keluarga juga memberikan pengalaman tentang tindak pidana kepada anak. Dalam kaitan ini K. Durkin mengatakan bahwa salah satu tempat terpenting dimana seorang belajar tentang agresi (tindak pidana) adalah dalam keluarga, terutama dalam cara membesarkan anak, dengan tingkah laku agresif pada anak-anak.

Jelasnya, bahwa anak yang terbiasa menyaksikan atau mengalami tindak kekerasan yang identik dengan tindak pidana (pemukulan misalnya) dalam keluarganya, dikemudian hari akan memandang tindakan itu bukan saja sebagai alternatif untuk menyelesaikan problemnya, melainkan juga dianggap layak untuk dilakukan, sehingga anak termotivasi untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang mengarah kepada tindak pidana. Dalam hal ini anak akan mudah melakukan tindak pidana untuk memenuhi keinginannya, dengan cara menganiaya orang lain lantaran dia sering mendapat pukulan dari orang tuanya di rumah.

Pengalaman buruk lainnya dapat diperoleh anak melalui pergaulan dengan teman-teman sebaya. Jika dalam lingkungan ini anak menyaksikan bahwa tindak pidana bisa menjadi alternatif untuk menyelesaikan persoalan, maka anak mendapat pembelajaran sosial yang dipandang efektif untuk diaplikasikan jika dibutuhkan.

Hal yang sama juga diperoleh melalui adegan-adegan kekerasan secara visualisasi, khususnya melalui media elektronik (televisi). Melalui tingginya frekuensi tontonan adegan kekerasan akan melahirkan apa yang disebut “kultur kekerasan”. Hal ini menimbulkan penggunaan tindak kekerasan yang mengarah kepada tindak pidana sebagai solusi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk anak.

Anak juga bisa melakukan tindak pidana karena terinspirasi dari tayangan film yang bernuansa judi seperti film *dewan judi* yang produksi oleh cina kemudian ditayangkan di Indonesia. Di samping itu anak nekad melakukan tindak pidana karena frustrasi akibat keinginannya tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Karena menurut teori agresif, frustrasi diakui “adanya pertautan langsung antara derajat frustrasi tertentu yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif. Tindakan yang dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang diinginkannya.

Dunia pendidikan juga menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Hal itu dimungkinkan karena hal-hal berikut:<sup>24</sup>

- 1) Akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik.

Dalam kaitan ini memungkinkan terjadinya kekerasan balasan dari korban terhadap pelaku.

- 2) Akibat buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku, yang kurikulumnya lebih mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan

---

<sup>24</sup>Hengki Kurniawan, [http://agnesekar.wordpress.com.penanggulangan-masalah-narkobamiras dan-judi/](http://agnesekar.wordpress.com.penanggulangan-masalah-narkobamiras-dan-judi/). (Diakses pada Jum'at 11 November 2016).

mengabaikan aspek afektif sehingga berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan.

- 3) Dipengaruhi masyarakat dan tayangan media massa.
- 4) Sebagai refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga memungkinkan munculnya sikap jalan pintas.
- 5) Dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku.<sup>25</sup>

Berdasarkan urian diatas yang sangat berpengaruh anak melakukan suatu tindakan pidana tersebut adalah pengaruh masyarakat atau pergaulan sehari-hari (lingkungan) dan tayangan media massa seperti televisi dan internet yang tidak mendidik tayangan-tayangan yang dengan mudah diakses oleh anak.

#### **G. Proses Pemidanaan Terhadap Anak**

Dalam proses pemidanaan terhadap anak di bawah umur dikenal konsep *diversi* dan *restorative justice*. Proses *diversi* bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Tujuan lain dari *diversi* adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bila proses persidangan juga masih tetap diberlakukan, maka

---

<sup>25</sup>Hengki Kurniawan, [http://agnesekar.wordpress.com.penanggulangan-masalah-narkobamiras dan-judi/](http://agnesekar.wordpress.com.penanggulangan-masalah-narkobamiras-dan-judi/). (Diakses pada Jum'at 11 November 2016).

dapatkah anak-anak tersebut mendapat kehidupan layaknya anak lain yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal seperti anak-anak lainnya yang tentu tidak terbelenggu dengan persidangan dan mungkin juga akhir hukuman yang jatuh kepada mereka untuk tinggal dan menetap di lembaga permasyarakatan.

*Diverpsi*, merupakan aturan ke-11 *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. *Diversi* sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memang belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal ayat (1) 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini seharusnya kembali dipikir ulang oleh berbagai pihak, bukan hanya Kepolisian dalam menangani perkara anak tersebut. Tapi juga Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen bangsa dan negara ini.<sup>26</sup>

Konsep pencegahan yang dipikirkan adalah untuk tidak munculnya persidangan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan pertemuan secara bersama untuk berdiskusi atau musyawarah. Tentunya musyawarah yang dilakukan juga untuk menjadi sebuah pembelajaran

---

<sup>26</sup>M. karjadi, *Himpunan Undang-Undang Terpenting bagi Penegak Hukum, Politea* (Bogor: PT. Karya Nusantara Cab. Bandung, 1975), h. 76.

bagi si orang tua secara khususnya. Sama seperti halnya dengan konsep Diversi yang memang belum mendapatkan peraturan yang jelas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera.<sup>27</sup> Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya.

Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Di Indonesia, konsep *restorative justice* dapat di lihat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 66 menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir untuk anak. Hal ini juga disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 64 yang menyatakan secara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana Anak* (Jakarta selatan: Gramedia, Raih Asa Sukses, 2010), h. 240.

<sup>28</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



## H. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam

Salah satu asas dalam hukum pidana Islam, adalah “la jarimah wala ‘uqubatan illa binas” (tidak ada jarimah/ tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali dengan adanya nas).

Karena itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana/jarimah terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang selama belum ada dalam nas yang jelas. Dengan kata lain, “tidak seorangpun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dijatuhi hukuman kecuali ada ketentuannya dalam undang-undang”.<sup>29</sup> Prinsip dasar ini merupakan asas legalitas dalam hukum pidana Islam, bahwa tidak ada hukuman/jarimah, tanpa ada ketentuan syara’ sesuai penjelasan QS Al-Isra 17:15

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولَ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang Rasul”.<sup>30</sup>

Asas legalitas ini pada hakekatnya untuk lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum dalam masyarakat. Ayat ini juga mengandung isyarat bahwa hukum pidana Islam juga menganut asas legalitas sejak 14 abad lalu,

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 31

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 426.

sedangkan hukum-hukum positif baru mengenal asas legalitas pada akhir abad ke-18, tepatnya tahun 1789.<sup>31</sup>

Sebagai konsekuensi dari asas legalitas tersebut pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam ditegakkan di atas tiga komponen, yaitu

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Ketiga unsur pertanggungjawaban pidana di atas bersifat kumulatif yang berarti bahwa jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka pertanggungjawaban pidana gugur demi hukum. Karena itulah beban pertanggungjawaban pidana hanya ditujukan kepada orang yang berakal sehat, telah dewasa dan berkemauan sendiri bukan karena dorongan di luar kesadarannya.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, adalah perbuatan maksiat yaitu perbuatan yang melawan hukum baik mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' maupun tidak melakukan perintah syara'. Dalam menentukan adanya unsur melawan hukum, maka faktor niat pelaku jarimah sangat menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku jarimah. Karena itulah jarimah yang dilakukan karena keliru tetap dikenakan hukuman "untuk kemaslahatan dan bersifat mendidik".

---

<sup>31</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet: IV* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 150.

<sup>32</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet: IV*, h. 158.

Di samping itu ada empat alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, yaitu terpaksa, mabuk, gila dan belum dewasa. Keempat unsur tersebut tidak menyebabkan perbuatan jarimah yang telah dilakukan berubah menjadi boleh. Esensi jarimahnya tetap Sebagai perbuatan yang melawan hukum, namun hukumannya dihapus.

Eksistensi penghapus pertanggungjawaban pidana tersebut berada dalam diri pelaku jarimah, bukan hal-hal lain di luar dirinya. Karena itu pula asas praduga tak bersalah merupakan asas fundamental dalam hukum pidana Islam. Sehingga untuk dapat dijatuhi pidana, bukan saja kesalahan terdakwa yang harus dibuktikan, namun juga apakah dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Penghapusan pidana didasarkan kepada hadist Nabi saw:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.<sup>33</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig".

<sup>33</sup>Ahmad bin Hanbal Abu 'Abd Allah al-Syaibani, *Musnad Ah}mad bin Hanbal*. Jilid II (Kairo: Mu'assasah Qurtubah, t.th.), h. 254.

Berdasarkan hadist ini tindakan dosa yang dilakukan orang yang belum dewasa dihapus (dimaafkan). Walaupun memang pemaafan terhadap tindakan dosa yang dilakukan orang yang belum dewasa di sini berlaku mutlak jika berkaitan dengan hak Tuhan dan jika berkaitan dengan hak sesama manusia, maka pemaafan tersebut berlaku terhadap hukuman pokok namun bukan berarti bebas dari hukuman sama sekali. Dalam hal ini pelaku dikenakan hukuman pengganti yang lebih ringan, yang jika berkaitan dengan pembunuhan, hukumannya bukan qisas melainkan diyat.<sup>34</sup>

Dengan demikian anak di bawah umur yang melakukan pencurian, penganiayaan, dan perbuatan jarimah lainnya pada hakekatnya belum bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karena unsur kedewasaan merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam. Karena anak di bawah umur termasuk dalam kategori orang yang belum dewasa.

Perspektif Hukum Islam, Agama Islam dengan ketiga rukunnya, yakni iman, Islam, dan ihsan atau akidah, syariat dan akhlak adalah murni diperuntukkan bagi kepentingan manusia. Tidak ada sedikitpun kepentingan Tuhan yang menurunkannya, karena Allah memang tidak memiliki kepentingan sekecil apapun. Karena itu setiap ketentuan agama, termasuk hukum pidananya akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia. Dalam untuk memelihara kepentingan manusia ini, maka Islam mensyariatkan

---

<sup>34</sup>Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 339.

adanya hukuman bagi orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana atau jarimah.<sup>35</sup>

Namun demikian untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, harus memperhatikan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana, adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan itu atas dasar kemauannya sendiri. Karena pelakunya mengetahui dengan kemauan dan kebebasan itu maksud dan akibat yang akan timbul dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Dengan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui maksud dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah. Karena itu anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (jarimah) secara intelektual tidak mengetahui akibatnya sehingga tindakannya belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah selain ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang terdapat dalam diri pelaku jarimah.

Pertanggung jawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu, baik yang berkaitan dengan perbuatan pelaku jarimah, maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku jarimah. Alasan penghapus

---

<sup>35</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet: IV* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 179.

pertanggungjawaban pidana karena perbuatan itu sendiri, disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan oleh syara', atau perbuatannya termasuk dalam kategori perbuatan mubah (tidak dilarang oleh syara').

Sedangkan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atau hapusnya hukuman pidana karena kondisi pelaku jarimah, antara lain:

- a. Karena paksaan atau terpaksa yang dalam hukum pidana Islam disebut ikrah, yaitu perbuatan yang terjadi atas seseorang oleh orang lain sehingga perbuatan itu luput dari kerelaannya atau dari kemauan bebas orang tersebut.
- b. Karena gila
- c. Karena mabuk
- d. Karena belum dewasa.<sup>36</sup>

Tiga alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atau hukuman pidana yang terakhir (karena gila, mabuk, dan karena belum dewasa) didasarkan kepada tekstual hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ali di atas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kejahatan atau jarimah yang dilakukan anak, secara esensial tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan jika sudah mampu bertanggungjawab atas kejahatannya dia akan dikenai hukuman. Akan tetapi anak yang masih di bawah umur tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindak pidana atau jarimah yang dilakukannya.

Dengan demikian anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau jarimah tidak bisa dihukum secara pidana. Akan tetapi orang tua anak di

---

<sup>36</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h 134.

bawah umur tersebut dihukum secara perdata dengan membayar ganti rugi kepada korban, jika akibat tindak pidana yang dilakukan anaknya itu menimbulkan kerugian materil kepada korban.

Orang tua dibebani kewajiban membayar ganti rugi karena tindak pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya sebagai akibat dari hasil didikan yang salah kepada anak. Konsekuensinya, adalah orang tua harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana atau jarimah yang dilakukan anaknya itu. Sebab itulah khalifah Umar bin Khattab menganggap “pemilihan (calon) ibu yang berakhlak baik sebagai salah satu hak anak. Jika anak durhaka, atau melakukan tindak pidana (jarimah), maka, yang harus dihukum justru orangtuanya, bukan anaknya”.<sup>37</sup>

Dengan demikian hukuman terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana atau jarimah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi anak baik-baik. Apabila anak menjadi jahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tuanyalah yang menanggung akibat tindakan anaknya, yakni diberi sanksi karena kelalaiannya.

Namun jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana atau jarimah menimbulkan kerugian besar terhadap korban maka tentunya dia harus diberikan pembinaan secara konsisten sehingga anak tersebut tidak tumbuh dewasa menjadi penjahat. Sebab esensi pemberian hukuman kepada pelaku jarimah menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan, dan kedua, adalah perbaikan dan pengajaran, agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang merugikan itu

---

<sup>37</sup>Iman Musbikin, *Mendidik Anak Ala Shinchin, Cet. II* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h. 153.

serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, antara lain:

- 1) Untuk memelihara/menyelamatkan masyarakat dari akibat perbuatan pelaku jarimah
- 2) Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang melakukan jarimah dia akan menerima balasan/hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sehingga diharapkan pelaku jera karena rasa sakit dan penderitaan lainnya, dan tidak mengulangnya lagi. Orang lain juga tidak akan berani meniru perbuatan pelaku jarimah sebab akibat yang sama juga akan dialaminya.
- 3) Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran agar orang lain menjadi baik dan anggota masyarakat pun akan baik pula.
- 4) Hukuman sebagai balasan atas perbuatan jarimah yang dilakukannya.<sup>38</sup>

Bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman pidana adalah untuk menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang dilakukannya di kemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukannya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukuman. Pemberian hukuman kepada anak di bawah umur semata-mata harus

---

<sup>38</sup>Iman Musbikin, *Mendidik Anak Ala Shinchin, Cet. II*, h. 64-65.



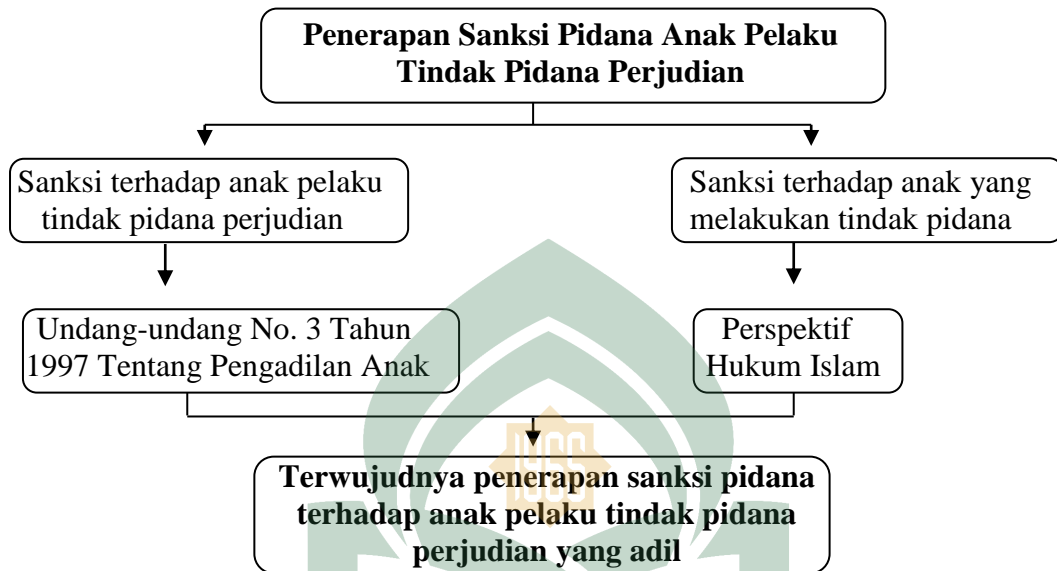
diarahkan sebagai upaya pendidikan dan pengajaran terhadap anak di bawah umur itu, bukan untuk pembalasan atas perbuatannya.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup>Ahmad Wardi Muhlich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 145.

## I. *Kerangka Konseptual*



### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penyusun skripsi ini menggunakan beberapa metode penelitian baik dalam pengumpulan data dan saat pengolahan data. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menekan pada deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat pada objek yang menjadi pokok permasalahan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Langkah pertama yang dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemakaian instrument undang-undang tentang pengadilan anak dan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian ditinjau dari persepektif hukum Islam. Selain itu digunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian ditinjau dari persepektif hukum Islam untuk menemukan penerapan saksi yang adil.

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menghubungkan masalah-masalah yang dibahas dengan pendekatan hukum, baik

dengan UUD 1945 atau peraturan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah tersebut. Dan selanjutnya ditinjau dari perspektif hukum Islam.

### **C. Sumber Data**

Dalam menyusun skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai macam literature seperti: hukum Islam yang mengatur tentang tindak pidana anak, pidana perjudian anak, undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan undang-undang yang ada kaitannya dengan terhadap sanksi pidana anak yang melakukan perjudian.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan pemikiran bersumber dari sejumlah literature, baik mengubah redaksi kalimatnya maupun tidak.

### **E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

#### **1. Pengolahan Data**

- a. Identifikasi data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literature, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
- b. Editing data adalah memeriksa data hasil penelitian untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan

jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh.

## **2. Analisis data**

Analisis data bertujuan mengurangi dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif yang menghendaki penegasan teknik analisis mencakup reduksi dan kategorisasi dan selanjutnya interpretasi dengan cara induktif dan deduktif.

### **F. Pengujian keabsahan data**

Dalam menguji data dan materi yang disajikan, dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau memperjelas mengenai aturan tentang tindak pidana anak, pidana perjudian anak, undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan undang-undang yang ada kaitannya dengan terhadap sanksi pidana anak yang melakukan perjudian dari persepektif hukum Islam.
2. Komperatif yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan.
3. Dedukatif yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian***

##### **1. Penerapan Sanksi Hukum Nasional**

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Misalnya dalam Pasal 45 KUHP bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut Pasal-Pasal 489, 490, 492 dan seterusnya pada saat umurnya belum 16 tahun (kini Pasal 45 diiadakan, dan diganti dengan UU No. 3 Tahun 1997: telah berumur 8 s/d 18 tahun dan belum kawin), hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada negara untuk pembinaan, adalah juga penderitaan bagi anak itu. Akan tetapi penderitaan ini masih ringan dibandingkan ia harus dipidana penjara dan menjalaninya.<sup>1</sup>

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>2</sup>

Pidana pokok terdiri dari:

##### **a. Pidana mati**

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), h. 24.

<sup>2</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, h. 27.

Baik berdasarkan Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia.

b. Pidana penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana tampaknya sama. Akan tetapi kedua jenis pidana itu sungguh berbeda jauh. Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.<sup>3</sup>

c. Pidana kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sama, berupa hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus, dan minimum umum serta minimum khusus.
- 3) Orang yang dipidana diwajibkan menjalankan pekerjaan tertentu walaupun dalam pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara.

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, h. 28.

4) Tempat menjalankan pidananya sama.<sup>4</sup>

d. Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis-jenis kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.

e. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan kejahatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.<sup>5</sup>

Pidana tambahan terdiri dari :

a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Menurut hukum pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan

---

<sup>4</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, h. 32.

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, h. 42.



pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapt dicabut tersebut adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata (TNI)
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau penngampuan atas anak sendiri
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian.<sup>6</sup>

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang – barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang, UU tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39), yaitu:

- 1) Barang-barang yang berasal dari suatu kejahatan.
- 2) Barang-barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan.<sup>7</sup>

c. Pidana pengumuman keputusan hakim

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, h. 43.

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, h. 43-44.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP). Bila tidak, maka putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut. KUHP meneglmopkkan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- 2) Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- 3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan suatu tindakan pelaksanaan.

## **2. Penerapan Sanksi Hukum Islam**

Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu:

- a. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potongan tangan, cambuk, rajam sampai mati.

---

<sup>8</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, h. 54.

<sup>9</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, h. 36.

- b. Membatasi kebebasan yang meliputi penjara atau mengirim si terhukum ke pengasingan.
- c. Membayar denda
- d. Peringatan yang diberikan hakim.<sup>10</sup>

Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah dapat dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya. Poin ada empat tipologi, yaitu:
  - (a) Hukuman pokok (*al"uaqubah al-asliyah*), yaitu hukuman yang telah ditetapkan dan merupakan hukuam asal dari suatu jarimah seperti hukuman qisas dalam pembunuhan, rajam, perzinahan dan potong tangan dalam pencurian.
  - (b) Hukuman pengganti (*alu"qubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan syar'i seperti denda dalam hukuman *qisas* dan *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* dan *qisas*.
  - (c) Hukuman tambahan (*alquubah al-taba"iyah*), yaitu yang mengikuti hukuman pokok tanpa mengikuti keputusan secara tersendiri. Seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga dan itu merupakan tambahan dari hukuman *qisas*.

---

<sup>10</sup>Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari"at Islam*, Ahli Bahasa Sulaiman Rasjid, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 11.

<sup>11</sup>Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari"at Islam*, Ahli Bahasa Sulaiman Rasjid, h. 16.

(d) Hukuman pelengkap (*al''uqubat al-takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.

2) Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan

(a) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, dimana seorang hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti dengan hukuman lain.

(b) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syar' agar bisa disesuaikan dengan keadaan perbuatan dan perbuatannya.

3) Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman

(a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan manusia. Seperti jilid.

(b) Hukuman yang dikenakan pada jiwa, seperti hukuman mati.

(c) Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara atau pengasingan.

4) Berdasarkan macamnya jarimah serta hukumannya:

(a) Hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah hudud*. Antara lain: jilid 100 kali, pengasingan, rajam. Tiga macam hukuman tersebut ditetapkan bagi *jarimah* perzinahan. Jilid 80 kali bagi *jarimah qadaf* dan peminum khamr, potong tangan bagi jarimah pencurian dan hukuman mati bagi pembunuhan. Hukuman mati dan salib, pemotongan anggota badan, dan pengasingan. Ketiga hukuman

tersebut ditetapkan dalam jarimah hirabah. Hukuman mati dan perampasan harta bagi jarimah murtad dan pemberontakan.

(b) Hukuman *qisas-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah:

- Qisas, yaitu pelaku jarimah dijatuhi hukuman setimpal bagi perbuatannya.
- Diyat, yaitu hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja.
- Pencabutan hak waris dan menerima wasiat merupakan hukuman tambahan dalam jarimah pembunuhan tidak sengaja.

(c) Hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah *ta'zir* seperti penjara kurungan, pengasingan ancaman, dan denda.

Metode-metode dalam rangka memberikan sanksi kepada anak yang nakal antara lain:<sup>12</sup>

- Metode *Ta'lim*

Metode *ta'lim* secara harfiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode *ta'lim* ini diterapkan terhadap obyek yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang dihadapinya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangan yang telah ditetapkan dalam agama.

- Metode *Tarhīb*

---

<sup>12</sup>M. Thalib, *Pendidikan Islami: Metode 30 T*, Cet. Ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), h. 210.

Metode ini artinya menimbulkan perasaan takut yang hebat kepada lawan. Metode tarhib berarti suatu cara yang digunakan dalam mendidik anak dengan cara penyampaian ancaman kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang nakal agar tidak meneruskan kebiasaan buruknya. Metode *tarhīb* berarti tidak membenarkan secara semena-mena kepada orang tua untuk melakukan kekerasan pada anak-anaknya tanpa pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh anak. Metode tarhib digunakan bilamana anak yang melakukan kesalahan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan ternyata anak tidak mau menghentikan perbuatan buruknya bahkan menimbulkan kecemasan kepada orang lain.

- Metode *Tagrīb*

Metode pendidikan dan pangajaran anak yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila bersalah.<sup>13</sup>

**B. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian**

Dalam kasus perjudian dapat kategorikan sebagai kasus kejahatan karena kualitas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi pidana, dalam hal ini Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun kasus perjudian yang dilakukan oleh anak perlu dilihat dalam perspektif hukum yang berbeda dibandingkan kasus hukum biasa dari segi pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena pelaku masih dikategorikan belum dewasa secara umur karena belum mencapai umur 18 (delapan

---

<sup>13</sup>M. Thalib, *Pendidikan Islami: Metode 30 T*, Cet. Ke-1, h. 214.

belas) tahun atau belum menikah, sehingga belum dapat diberlakukan prosedur hukum sebagaimana layaknya orang dewasa.<sup>14</sup>

Kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan memang membutuhkan penanganan khusus, mengingat bahwa subjek hukumnya adalah anak yang belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat. Anak dianggap belum mampu menyadari akibat dan konsekuensi dari perbuatan yang melanggar dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidakseimbangan dan disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mereka masih dalam tahap bermain, berkembang dan pencarian jati diri.

Berdasarkan penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa di Indonesia mengatur agar anak sebagai pelaku kejahatan mendapatkan perlakuan hukum khusus atas 'belum sepenuhnya' anak-anak tersebut sebagai subjek hukum, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam hal ini Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 yaitu 'Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin'.<sup>15</sup>

Dalam kasus penangkapan anak-anak yang sedang bermain judi, kita harus menggunakan perspektif hukum pidana menurut pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian pula dalam melaksanakan proses hukum terhadap anak, selain mengacu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

<sup>14</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), h. 123.

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak* (Bandung: Fokusmedia, 1997), h. 23.

Pidana, proses hukumnya kepada tersangka anak harus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997.<sup>16</sup>

Konsep pemidanaan terhadap anak di bawah umur dikenal konsep *diversi* dan *restorative justice*. Proses *diversi* bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Tujuan lain dari *diversi* adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bila proses persidangan juga masih tetap diberlakukan, maka dapatkah anak-anak tersebut mendapat kehidupan layaknya anak lain yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal seperti anak-anak lainnya yang tentu tidak terbelenggu dengan persidangan dan mungkin juga akhir hukuman yang jatuh kepada mereka untuk tinggal dan menetap di lembaga permasyarakatan.

Hal tersebut merupakan aturan ke-11 *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Diversi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memang belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal ayat (1) 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat

---

<sup>16</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, h. 26.



Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini seharusnya kembali dipikir ulang oleh berbagai pihak, bukan hanya Kepolisian dalam menangani perkara anak tersebut. Tapi juga Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen bangsa dan negara ini.

Konsep pencegahan yang dipikirkan adalah untuk tidak munculnya persidangan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan pertemuan secara bersama untuk berdiskusi atau musyawarah. Tentunya musyawarah yang dilakukan juga untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi si orang tua secara khususnya. Sama seperti halnya dengan Konsep *Diversi* yang memang belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

*Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar criminal justice sistem (sistem peradilan pidana). Proses restorative justice bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatunyan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya.

Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Di Indonesia, konsep restorative justice dapat dilihat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 66 menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir untuk anak. Hal ini juga disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 64 yang menyatakan secara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.<sup>17</sup>

### ***C. Penerapan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Hukum Islam***

Negara Indonesia adalah negara Pancasila, agama merupakan salah satu fundamen yang penting dan pokok. Hal ini terlihat dalam urutan sila-sila Pancasila dimana Ketuhanan Yang Maha Esa berada dalam urutan pertama. Mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi seperti yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 45.

Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah bukan merupakan negara sekuler, yang berdasarkan atas suatu agama tertentu melainkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila juga pasal 29 ayat (1) UUD'45). Dikatakan termasuk bukan negara sekuler, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan negara RI tidak memisahkan sama sekali urusan kenegaraan dengan urusan keagamaan, terbuka dengan adanya departemen (kementrian) agama di dalam susunan pemerintahannya.

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Agama merupakan sumber kepribadian bangsa di dalam pelaksanaannya harus dijalankan dan ditaati. Hal itu bertujuan agar tidak menyimpang dari norma yang ada di dalam agama tersebut. Kenyataan di dalam hidup ini orang tidak jarang menyimpang dari norma agama, hal itu disebabkan oleh kurangnya iman terhadap seseorang yang akhirnya dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Dilihat dari sanksinya bahwa norma agama merupakan perintah dari Tuhan maka terhadap pelanggaran tersebut akan mendapat sanksi di akhirat kelak.

Ditinjau dari segi apapun juga, maka judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak mudharotnya dibandingkan dengan manfaatnya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat.

Allah SWT telah melarang judi sebagaimana di dalam QS Al-Maidah/5:90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah-panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan”.<sup>18</sup>

Di samping itu juga dalam QS Al-Maidah/5:91. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 97.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu antara meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan Sholat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu”.<sup>19</sup>

Penjelasan Quraish Shihab “Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-kitabnya dan rasulnya dan tunduk kepada kebenaran, sesungguhnya meminum minuman keras yang memabukkan, berjudi, menancapkan batu sebagai landasan menyembelih kurban untuk mendekatkan diri kepada patung-patung yang kalian sembah, melepaskan anak panah, batu kerikil atau daun untuk mengetahui ketentuan ketentuan yang gaib, semua itu tiada lain hanyalah kotoran jiwa yang merupakan tipu daya setan bagi pelakunya. Maka, tinggalkanlah itu semua agar kalian mendapatkan kemenangan di dunia dengan kehidupan yang mulia dan di akhirat dengan kenikmatan syurga.”<sup>20</sup>

Al-Thabariy menjelaskan bahwa “dosa besar” yang terdapat pada judi yang dimaksud ayat di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan, konsekwensinya, ia melakukan kezaliman terhadap diri, harta dan keluarganya atau terhadap harta, keluarga dan orang lain.

Kezaliman yang dilakukannya terhadap dirinya adalah penurunan kualitas keberagamaannya, dengan kelalaiannya dari mengingat Allah dan shalat. Sedangkan kezaliman terhadap orang lain adalah membuka peluang terjadinya permusuhan dan

---

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

<sup>20</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah* (Jakarta: Lentera Hati 2002), h.192-193.

perpecahan.<sup>21</sup> Sementara keuntungan yang ditumbulkan dari perjudian itu hanya terbatas pada keuntungan material, kalau ia menang.

Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di dalam tafsirnya mengenai ayat diatas tentang judi bahwa setiap kompetisi yang memiliki taruhan dari kedua belah pihak, baik dengan main kartu atau catur. Maka setiap kompetisi dalam bentuk ucapan atau perbuatan dengan mengadakan taruhan masuk di dalamnya, kecuali perlombaan balap kuda, balap unta, dan memanah. Ketiganya dibolehkan karena berfungsi untuk menopang jihad, karenanya diberi keringanan oleh syariat.<sup>22</sup>

Penjelasan ayat tersebut secara umum ada 4 (empat) yang dilarang Allah yaitu meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Perbuatan ini tidak hanya perbuatan dosa yang berakibat buruk kepada pelakunya, terutama khamr dan judi. Perbuatan ini bersumber maksiat dan pangkal kejahatan lainnya. Maka orang Islam dilarang melakukan perbuatan tersebut, ia harus dianggap sebagai musuh yang dapat harus dihancurkan keharmonisan dalam kehidupan ini. Karena minuman khamr, judi, berhala dan azlam merupakan dosa besar dan perbuatan setan.<sup>23</sup> Maka orang-orang mukmin diperintahkan agar menjauhi perbuatan tersebut.

---

<sup>21</sup>Saad Saefullah, <https://www.islampos.com/al-quran-menyebut-judi-sebanyak-3-kali-143100/> (Diakses pada Sabtu 03 Desember 2016).

<sup>22</sup>See more at, <http://www.voa-islam.com/read/aqidah/2010/07/02/7702/melokalisasi-judi-menghalalkan-yang-haram/#sthash.Fr9BEfp7.dpuf> (Diakses pada Sabtu 03 Desember 2016).

<sup>23</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, Rawai'ul Bayan:Tafsir Ayat-ayat Hukum (Semarang: CV. Asy-syifa, 1994), h. 434.

Sudah jelas bahwa dari segi norma agama Islam melarang umatnya bermain judi kemudian agama-agama lainnya pun juga demikian sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang. Adanya ayat tersebut memberikan petunjuk untuk tidak melakukan perjudian, sebab judi dapat menimbulkan permusuhan dan hanya orang-orang yang tidak beriman sajalah yang mencoba untuk mendekati judi. Manusia makhluk utama, mulia dan tinggi, dia mempunyai kelebihan dibanding makhluk-makhluk lain, kemuliaan, keutamaan dan kelebihan itu ada pada potensi rohaniyahnya, dimana pikiran sumber cipta, perasaan sumber rasa dan karya, ketiganya menentukan nilai budaya dan pengetahuan manusia.

Penegakan hukum pidana islam terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 8 tahun seharusnya tidak diproses secara hukum seperti anak yang telah berusia 8 tahun. Di samping itu menurut hukum pidana Islam, seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa, dan sehat akalnya, sesuai hadis Nabi saw:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ  
حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.<sup>24</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig”.

Menurut Imam Syafi'i makna hadits di atas “di angkat pembebanan” menunjukkan bahwa ada syarat atau sebab sehingga adanya tautan syara'. Anak-anak sampai ia baliq menunjukkan bahwa syarat/sebab yang harus ada adalah bermimpi basah. Ini merupakan hukum asal yang telah di tetapkan dalam hukum islam. Apabila seseorang anak belum juga mengalami mimpi basah pada usia mencapai baliq, hal mana di anggap telah terjadi suatu kerusakan pada orang tersebut, karena itu wajib di anggap orang telah baliq yang mewajibkan padanya pembebanan hukum. Alasan pandangan ini memberikan batasan usia delapan belas atau Sembilan belas tahun.<sup>25</sup>

Para Fukaha, dasar dalam menentukan usia dewasa adalah sabda rasullah SAW, di angkat pembebanan hukum dari tiga jenis orang; anak-anak sampai ia baliq, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia sembuh/sadar. Dari makna

<sup>24</sup>Ahmad bin Hanbal Abu 'Abd Allah al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Jilid II (Kairo: Mu'assasah Qurtubah, t.th.), h. 254.

<sup>25</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1998), h. 137.

hadits di atas “di angkat pembebanan “ menunjukkan bahwa ada syarat atau sebab sehingga adanya tautan syara’, anak-anak sampai ia baliq.<sup>26</sup>

Penjelasan hadits diatas bahwa diangkatnya pena adalah tidak dibebani menjalankan syariat dimana bentuk pembebanan syariat yaitu dengan dicatatnya amalan seorang hamba oleh para malaikat pencatat amal. Hal ini menunjukkan bahwa pembebanan syariat berlaku secara lazim bagi semua manusia kecuali 3 golongan yang disebutkan dalam hadits di atas, adapun selain 3 golongan tersebut maka tidak akan terlepas dari dicatatnya amalan hingga ia meninggal dunia.<sup>27</sup>

1. Orang yang tidur sampai ia bangun, yakni bangun dari tidurnya, karena orang yang tidur tidak sadar dan tidak tahu apa yang diperbuatnya dalam keadaan tidur, sehingga pencatatan amalan tidak berlaku bagi perbuatannya di saat tidur.
2. Orang yang sakit hingga sembuh, maksudnya adalah sakit jiwa atau hilang akal alias gila, orang gila tidak akan dicatat amalan yang ia perbuat ketika gila sampai ia sembuh dan waras kembali.
3. Anak kecil hingga ia dewasa, yakni anak-anak yang belum akil baligh tidak dicatat amalan kejelekannya walaupun sudah tamyiz (bisa membedakan baik dan buruk) sampai ia baligh yang ditandai dengan mimpi basah. Namun khusus golongan ini , yang tidak dicatat hanyalah amalan jeleknya saja, adapun amalan solehnya tetap dicatat dan akan diberi pahala, sebagaimana

---

<sup>26</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, h. 291.

<sup>27</sup>Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, h. 299.



dalam suatu hadits bahwa ada seorang wanita yang menanyakan anak bayinya yang dihajikan apakah sah hajinya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengiyakannya.

Adapun 2 golongan sebelumnya yaitu orang tidur dan orang gila, maka amalan solehnya tidak dicatat kerana mereka dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk sah beramal soleh dikarenakan hilangnya akal, berbeda dengan anak kecil yang masih berakal sehat, maka amalan ibadahnya tetap sah sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para orang tua untuk menyuruh anak-anaknya yang masih 7 tahun untuk shalat dan memukulnya jika tidak mau shalat ketika berumur 10 tahun, padahal pada umur 7-10 tahun ia belum waktunya baligh, namun tetap disuruh beribadah.<sup>28</sup>

Seorang manusia belum dikenakan taklif (pembebanan hukum) sebelum ia cakap untuk bertindak hukum. Untuk itu, para ulama' ushul fiqh, mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang di tujukan kepadanya. Seseorang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila dan anak kecil tidak dikenakan taklif. Karena mereka tidak atau belum berakal, maka mereka di anggap tidak bisa memahami taklif dari syara'. Namun, apabila anak dibawah umur melakukan suatu pelanggaran pidana atau bersalah dalam islam maka dibebankan kepada orang tua (walinya) karena orang tua wajib mendidik anak agar

---

<sup>28</sup>Akhmad fahrison, <http://gambarunnah.blogspot.co.id/2015/10/hadits-70-program-jodoh.html> (Diakses pada Sabtu 03 Desember 2016).

menjadi orangt baik apabila kewajiban tersebut tidak melaksanakan dengan baik  
maka orang tualah yang menanggung akibatnya yaitu diberikan sanksi karena  
kelalaian



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan:

1. Bahwa penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak harus perlakukan khusus artinya penahanan tidak ditempatkan dengan bersama-sama dengan tersangka dewasa karena dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dan mempengaruhi psikologis dan mental kejiwaan anak atau dengan cara menitipkan anak ke LP anak, namun tetap diproses sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan proses hukumnya kepada tersangka anak harus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997. Konsep pemidanaan terhadap anak di bawah umur dikenal konsep *diversi* dan *restorative justice*. Proses *diversi* bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Sedangkan proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatunyan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera.

2. Bahwa penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian menurut hukum Islam. Pada dasarnya dari segi norma agama Islam melarang umatnya bermain judi sebab dari adanya permainan judi tersebut menyebabkan permusuhan antara sesama umat manusia yaitu saling dendam dan iri hati dan dari adanya perbuatan judi tersebut akan membuat harta benda menjadi mubazir, tidak halal. Harta benda yang dihasilkan dari perjudian ini termasuk cara yang terlarang. Kejahatan perjudian yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa merupakan suatu pelanggaran yang dimaafkan sehingga demikian apabila anak yang melakukan kejahatan tersebut hanya dapat dikategorikan sebagai suatu pembentukan karakter dan tidak dapat dihukum secara hukum islam.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi penegak hukum agar kiranya lebih bijak menghadapi kasus-kasus perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan lebih mempertimbangkan dari aspek sosiologis anak.
2. Diharapkan agar orang tua lebih aktif untuk memberikan pelajaran dan bimbingan kepada anaknya tentang bahaya judi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1998), h. 137.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, h. 291.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, h. 299.
- Abdullah Ghalib, *Undang-Undang yang Berdasarkan Hukum dan Pancasila* (Bandung: Nusa Media, 2013), h. 54.
- Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Ahli Bahasa Sulaiman Rasjid, Cet. Ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 11.
- Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Ahli Bahasa Sulaiman Rasjid, h. 16.
- Achmad Amrullah, *Pembinaan, Pendidikan dan Pengembangan Perilaku Anak* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 71.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), h. 123.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), h. 24..
- Ahmad bin Hanbal Abu 'Abd Allah al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Jilid II (Kairo: Mu'assasah Qurtubah, t.th.), h. 254.
- Ahmad bin Hanbal Abu 'Abd Allah al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Jilid II (Kairo: Mu'assasah Qurtubah, t.th.), h. 254.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet: IV* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 150.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet: IV* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 179.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cet: IV*, h. 158.
- Ahmad Wardi Muhlich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 145.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 31.

- Akhmad fahrison, <http://gambarsunnah.blogspot.co.id/2015/10/hadits-70-program-jodoh.html> (Diakses pada Sabtu 03 Desember 2016).
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962), h. 220.
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 276.
- Emilia Setyoning, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2010), h. 46.
- Harper Erica, *Anak dalam Pergaulan di Masyarakat dan Lingkungannya* (Surabaya: LP3I, 2007), h. 56.
- Haryanto, *Indonesia Negeri Judi* (Jakarta: Yayasan Khasanah Ihsan Mandiri, 2003), h. 136.
- Haryanto, *Indonesia Negeri Judi* (Jakarta: Yayasan Khasanah Ihsan Mandiri, 2003), h. 365.
- Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, h. 139.
- Hengki Kurniawan, <http://agnessekar.wordpress.com/penanggulangan-masalah-narkobamiras-dan-judi/>. (Diakses pada Jum'at 11 November 2016)
- Hengki Kurniawan, <http://agnessekar.wordpress.com/penanggulangan-masalah-narkobamiras-dan-judi/>. (Diakses pada Jum'at 11 November 2016).
- Hengki Kurniawan, <http://agnessekar.wordpress.com/penanggulangan-masalah-narkobamiras-dan-judi/>. (Diakses pada Jum'at 11 November 2016).
- Ilham Gunawan, *Tindakan Melanggar Hukum Yang dilakukan oleh Anak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 89.
- Ilham Gunawan, *Tindakan Melanggar Hukum yang Dilakukan oleh Anak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 126.
- Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), h. 339.
- Iman Musbikin, *Mendidik Anak Ala Shinchin, Cet. II* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h. 153.
- Iman Musbikin, *Mendidik Anak Ala Shinchin, Cet. II*, h. 64-65.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 2012), h.122.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), h. 204.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, h. 206.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 426.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 97.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.
- Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta media, 2005), h. 142.
- Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- M. karjadi, *Himpunan Undang-Undang Terpenting bagi Penegak Hukum, Politea* (Bogor: PT. Karya Nusantara Cab. Bandung, 1975), h. 76.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah* (Jakarta: Lentera Hati 2002), h.192-193.
- M. Sofyan Lubis, *Menghadapi Perbuatan dan Tingkah Laku Anak Nakal* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), h. 78.
- M. Sofyan Lubis, *Menghadapi Perbuatan dan Tingkah Laku Anak Nakal* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2003), h. 112.
- M. Thalib, *Pendidikan Islami: Metode 30 T*, Cet. Ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), h. 210.
- M. Thalib, *Pendidikan Islami: Metode 30 T*, Cet. Ke-1, h. 214.
- Menurut Konvensi Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1999.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan: Tafsir Ayat-ayat Hukum* (Semarang: CV. Asy-syifa, 1994), h. 434.
- Panjaitan dan Simorangkir, *Lembaga Perasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 129.
- Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ke II; Jakarta: Balai Pustaka 1995), h. 419.
- R. Sunarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h.34.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h 134.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Peradilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak* (Bandung: Fokusmedia, 1997), h. 23.

Republik Indonesia, *Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, h. 26.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Saad Saefullah, <https://www.islampos.com/al-quran-menyebut-judi-sebanyak-3-kali-143100/> (Diakses pada Sabtu 03 Desember 2016).

Santi Kusumaningrum, *Perkembangan Manusia* (Jakarta: Gramedia 2001), h. 77.

See more at, <http://www.voa-islam.com/read/aqidah/2010/07/02/7702/melokalisasi-judi-menghalalkan-yang-haram/#sthash.Fr9BEfp7.dpuf> (Diakses pada Sabtu 03 Desember 2016).

Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana Anak* (Jakarta selatan: Gramedia, Raih Asa Sukses, 2010), h. 96.

Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana Anak* (Jakarta selatan: Gramedia, Raih Asa Sukses, 2010), h. 125.

Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana Anak* (Jakarta selatan: Gramedia, Raih Asa Sukses, 2010), h. 240.

Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana Anak*, h. 126.

Sofyan Lubis, *Tinjauan Hukum tentang Judi* (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 230.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 46.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 47.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, h. 48.



Winata Hadi, *Pengembangan dan Pendidikan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 23.

